



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DHIKA DWI SRIWAHYUNI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 220079

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	392.300.000
1. Tanah Seluas 141 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 42.300.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/80 m2 di KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	198.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 98.500.000		
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.429.379
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	670.729.379
III. HUTANG	Rp.	203.972.270

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

466.757.109**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.